

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan merupakan rangkaian berkesinambungan yang meliputi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa daerah dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dengan memanfaatkan kekayaan daerah yang dimiliki oleh daerah masing – masing.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip – prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat (*www. Djpkd. Go. Id, undang – undang otonomi daerah, 2004*).

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti daripada Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah

Daerah, telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan propinsi, kabupaten, atau kota. Prinsip dasar pemberian otonomi daerah dimaksudkan atas dasar pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Kemandirian daerah dalam meningkatkan kemampuannya mencakup pada penggalan dan mobilisasi sumber – sumber pendapatan daerah. Salah satu dari sumber – sumber pendapatan daerah tersebut adalah pendapatan asli daerah ( PAD). Setiap daerah oleh pemerintah pusat diberi satu keleluasaan untuk membina keuangan daerahnya sendiri. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah ini dapat meningkatkan pendapatan asli daerah guna memenuhi standar kebutuhan pembangunan daerah. Upaya peningkatan pendapatan daerah ini dapat dilakukan dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan efektivitas pemungutan, yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada serta terus diupayakan menggali sumber – sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya.

Dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah propinsi, kabupaten, atau kota yang meliputi tugas pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pemerintah daerah propinsi, kabupaten, atau kota, menurut Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 memiliki sumber – sumber pembiayaan yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah.
  - b. Hasil retribusi daerah.
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro.
2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain –lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang, kemandirian dalam pendanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih patut dipertanyakan. Walaupun dalam tiga tahun terakhir ini telah diupayakan eksploitasi berbagai sumber pendapatan melalui berbagai cara seperti perubahan dan penerbitan perda, perubahan tarif dan lain – lain. Dilihat dari kemampuan daerahnya sendiri realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Tahun 2003 sebesar Rp. 35.292.510.000,00 ( *Bagian Keuangan Kabupaten Magelang, BPS Kabupaten Magelang* ) atau 7,68 % dari keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Magelang sebesar Rp. 459.359.058.751,00. Dengan kata lain hanya 7,68 % itulah yang merupakan kemampuan daerah untuk membiayai dan mendanai seluruh kebutuhan pemerintahan dan pembangunan. Atau dapat dikatakan kondisi ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan dan sumbangan dari

pemerintah pusat atau propinsi Jawa Tengah khususnya masih sangat tinggi. Mengingat upaya untuk tetap mengandalkan sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat berupa sumbangan dan bantuan sudah semakin sulit, maka untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) khususnya pajak daerah dan retribusi daerah menjadi keharusan untuk selalu dioptimalkan.

Bila dilihat dari sisi Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Magelang, sektor retribusi daerah memberikan peran yang berarti bagi keuangan daerah. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, retribusi menempati urutan kedua setelah pajak daerah. Oleh karena itu peranannya menjadi sangat penting bagi pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan rutinnya. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang untuk tahun anggaran 1999/2000 – 2003/2004 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang  
Tahun Anggaran 1999/2000 – 2003  
( ribuan rupiah )

No	Komponen PAD	1999/2000	2000	2001	2002	2003
1	Pajak Daerah	5.394.997.363	6.905.139.516	10.947.677.372	13.088.962.888	14.294.942.292
2	Retribusi Daerah	3.988.483.000	3.703.833.390	7.969.772.608	10.186.523.138	10.372.009.064
3	Hasil Perusahaan Milik Daerah	571.781.778	628.574.788	1.514.975.572	1.394.937.911	2.107.227.899
4	Lain-lain PAD yang Sah	771.633.457	709.065.123	3.304.919.100	7.409.013.623	8.518.330.745
Jumlah PAD		10.726.895.598	11.946.612.817	23.737.344.652	32.079.437.560	35.292.510.000

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pendapatan melalui retribusi daerah dari tahun 1999 sampai tahun 2000 mengalami penurunan, dan pada tahun 2001 sampai tahun 2003 mengalami peningkatan. Meskipun bukan penyumbang terbesar dalam penerimaan PAD, tetapi penerimaan dari sektor retribusi daerah mempunyai peran penting dalam peningkatan PAD bila pemerintah daerah dapat memaksimalkan usahanya dalam sektor ini. Keleluasaan daerah untuk selalu mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor retribusi ini menjadi tanggung jawab masing – masing daerah dalam upaya mengelola berbagai fasilitas yang dimiliki atau jasa yang dapat dipungut retribusi.

Retribusi daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki prospek yang sangat baik untuk dikembangkan, oleh karena itu retribusi daerah harus dikelola secara transparan dan profesional dalam rangka optimalisasi dan usaha peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi pemungutannya dan ekstensifikasi subyek dan obyek retribusi daerah. Dari berbagai pajak daerah dan retribusi daerah, salah satu yang cukup menonjol adalah penerimaan retribusi pasar. Retribusi pasar dipungut berdasarkan bahwa pasar dan fasilitasnya yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Kontribusi retribusi pasar di Pemerintah Kabupaten Magelang menempati urutan pertama atau terbesar kontribusinya terhadap

penerimaan retribusi daerah di Kabupaten Magelang. Sebagai gambaran dapat dilihat bahwa keseluruhan pendapatan dari sektor retribusi daerah di Kabupaten Magelang pada tahun 2003 sebesar Rp. 10.372.009.064 (*Bagian Keuangan Kabupaten Magelang, BPS Kabupaten Magelang*), sedangkan retribusi pasar sebesar Rp. 2.235.544.916 (*Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang*) dari keseluruhan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 35.292.510.000 (*Bagian Keuangan Kabupaten Magelang, BPS Kabupaten Magelang*). Dengan demikian dapat dikatakan kontribusi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pengaruhnya cukup signifikan.

Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa dari berbagai jenis retribusi daerah di Kabupaten Magelang hanya retribusi pasar yang dapat meraih pendapatan diatas satu milyar setiap tahunnya.

Dengan latar belakang masalah tersebut diatas, dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul : **“ ANALISIS FAKTOR - FAKTOR PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2002 / 2003 “**

### **1.2. Perumusan Masalah**

2. Bagaimana pengaruh jumlah pedagang pasar terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Magelang ?
3. Bagaimana pengaruh jumlah luas lahan terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Magelang ?
4. Bagaimana pengaruh laju inflasi terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Magelang ?
5. Bagaimana pengaruh jumlah pedagang pasar, jumlah luas lahan pasar, dan laju inflasi secara serempak terhadap penerimaan retribusi pasar Kabupaten Magelang ?

### **1.3. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini sebagai batasan masalah, yaitu :

1. Obyek penelitian adalah penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magelang, sedangkan data - data yang digunakan adalah periode tahun anggaran 2002 / 2003, dengan tinjauan dari bulan April 2002 sampai dengan bulan Oktober 2003.
2. Mengenai variabel – variabel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
  - a. Retribusi pasar adalah semua bentuk pungutan daerah sebagai pembayaran dari penggunaan atau memperoleh jasa milik

- pemerintah daerah yang berupa pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah.
- b. Jumlah pedagang pasar adalah jumlah orang yang menggunakan pasar sebagai tempat jual beli yang tercatat sebagai pedagang oleh Dinas Pengelola Pasar.
  - c. Jumlah luas lahan pasar adalah lahan atau tempat yang digunakan oleh pedagang pasar sebagai tempat jual beli.
  - d. Laju inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga – harga secara umum dan terus menerus didasarkan pada indeks harga konsumen.

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah pedagang terhadap variabel penerimaan retribusi pasar Kabupaten Magelang.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel luas lahan terhadap variabel penerimaan retribusi pasar Kabupaten Magelang.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel laju inflasi terhadap variabel penerimaan retribusi pasar Kabupaten Magelang.
4. Untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah pedagang, jumlah luas lahan pasar, dan laju inflasi secara serempak terhadap variabel penerimaan retribusi pasar Kabupaten Magelang.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan Pemerintah Daerah.
- 1 Bagi peneliti, dapat menambah pemahaman sesuai dengan tema penelitian.
- 2 Dapat menambah koleksi pustaka dan pengetahuan bagi pembaca yang memerlukan informasi mengenai retribusi pasar.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibagi menjadi 7 bab, yaitu :

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis.

#### **BAB II           TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek yang diteliti dalam penelitian, meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan perekonomian, dan perkembangan retribusi pasar

**BAB III KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang hasil – hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

**BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi tentang teori – teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, terutama tentang retribusi daerah, retribusi pasar, serta pendapatan asli daerah dan hipotesis penelitian.

**BAB V METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam dalam penelitian beserta data-data dan sumber-sumber data yang digunakan

**BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisis penelitian.

**BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil – hasil perhitungan analisis dan implikasi yang sesuai dengan permasalahan.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

## BAB II

### TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

#### 2.1. Keadaan Geografis

Kabupaten Magelang sebagai bagian dari Propinsi Jawa Tengah diapit oleh beberapa kabupaten atau kota. Secara geografis berbatasan wilayah dengan :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang.
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo.
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Purworejo dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- e. Di Tengah : Terletak Kota Magelang.

Kabupaten Magelang terletak antara :

110° - 01' - 51" Bujur Timur

110° - 26' - 58" Bujur Timur

7° - 19' - 13" Lintang Selatan

7° - 42' - 16" Lintang Selatan

Jarak dari Kota Magelang ke beberapa kota penting :

- Jakarta : 560 Km
- Bandung : 403 Km
- Bogor : 530 Km
- Serang : 611 Km
- Yogyakarta : 43 Km

- Surabaya : 370 Km
- Jember : 522 Km
- Banyuwangi : 633 Km
- Malang : 403 Km
- Madiun : 221Km
- Cirebon : 274 Km

## **2.2. Keadaan Penduduk**

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik ( BPS ) Kabupaten Magelang tahun 2003 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Magelang tercatat sebanyak 1.147.117 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk perempuan memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk laki – laki, hal ini terlihat dari Rasio Jenis Kelamin sebesar 99,90. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, maka jumlah rumah tangga juga bertambah, pada tahun 2002 tercatat sebesar 285.922 rumah tangga, dan pada tahun 2003 bertambah menjadi 288.225 rumah tangga atau naik sebesar 0,80 persen. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai banyaknya penduduk dan penambahan penduduk serta jumlah rumah tangga daerah Kabupaten Magelang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Banyaknya Rumah Tangga dan Penduduk Kabupaten Magelang**  
**Menurut Jenis Kelamin pada tahun 1999 – 2003**  
**( Jiwa )**

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah penduduk Laki - laki	Jumlah Penduduk Perempuan
1999	254.436	542.031	552.044
2000	281.076	550.069	550.844
2001	283.395	558.231	555.016
2002	285.922	563.085	560.852
2003	288.234	573.180	573.937

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

### **2.3. Perekonomian Kabupaten Magelang**

Kegiatan perekonomian Kabupaten Magelang tidak hanya terkonsentrasi pada sektor yang dominan, melainkan saling mendukung antar sektor. Pada kenyataannya memang sektor pertanian dan sektor industri yang menjadi primadona dan pendukung utama dalam pergerakan perekonomian di Kabupaten Magelang. Masing-masing sektor memberikan kontribusi yang sangat membantu dalam pelaksanaan kegiatan perekonomian dan memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan ekonomi di Kabupaten Magelang.

Bila dilihat melalui angka PDRB atas dasar harga konstan selalu mengalami peningkatan meski tidak begitu besar. Secara keseluruhan PDRB Kabupaten Magelang atas dasar harga konstan mengalami peningkatan dari Rp 1.019.215,60 pada tahun 1999 menjadi Rp 1.184.637,36 pada tahun 2003 hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2  
 Produk Domestik Regional Brutto Kabupaten Magelang atas dasar  
 Harga Konstan Tahun 1999 – 2003  
 ( Jutaan Rupiah )

Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002	2003
Sektor Primer	357.633,10	357.956,82	361.385,78	374.758,13	384.568,16
Sektor Sekunder	260.084,08	273.231,18	287.325,08	299.580,02	313.624,08
Sektor Tertier	401.498,42	423.741,25	447.491,03	471.205,06	486.445,12
PDRB	1.019.215,60	1.054.929,25	1.096.201,90	1.145.543,21	1.184.637,36

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Meskipun hampir semua sektor mengalami kenaikan, namun secara keseluruhan kenaikan tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Penyebabnya adalah sektor-sektor yang mempunyai andil besar dalam pembentukan PDRB masih mengalami kenaikan yang relatif kecil.

#### 2.4. Perkembangan Retribusi Pasar Kabupaten Magelang

Roda pemerintahan dan pembangunan di daerah tidak akan pernah bergerak kalau tidak ada dana atau anggaran pendapatan dan belanja yang memadai. Sesuai dengan syarat pembangunan yang berkelanjutan, maka pemerintah daerah akan senantiasa meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Pada tahun anggaran 2003 realisasi penerimaan total sebesar Rp 459.359.058.751 milyar, yang mana pada bagian Pendapatan Asli Daerah menyumbang dana sebesar Rp 35.292.510.000 milyar. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3  
Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Magelang  
Tahun Anggaran 2003

No	Uraian Penerimaan	Nilai ( Rp )
<b>1</b>	<b>Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu</b>	<b>56.653.358.802</b>
<b>2</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>35.292.510.000</b>
2.1	Pajak Daerah	14.294.942.292
2.2	Retribusi Daerah	10.372.009.6064
2.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah	2.107.227.899
2.4	Lain – lain PAD yang Sah	8.518.330.745
<b>3</b>	<b>Pendapatan Berasal dari Pemberian Pemerintah atau Instansi Lebih Tinggi</b>	<b>338.751.458.938</b>
3.1	Bagi Hasil Pajak	27.288.673.527
3.2	Bagi Hasil Bukan Pajak, Sumber daya Alam	747.068.811
3.3	Dana Alokasi Umum	300.629.991.000
3.4	Dana Penerimaan dari Propinsi	10.085.725.600
<b>4</b>	<b>Lain – lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>3.585.710.000</b>
<b>5</b>	<b>Urusan Kas dan Perhitungan</b>	<b>25.076.021.011</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>459.359.058.751</b>

Sumber : BPS Kabupaten Magelang

Usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Magelang terus diupayakan semaksimal mungkin, salah satu upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan pendapatan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Magelang mengelola bermacam macam jenis retribusi daerah, salah satu retribusi daerah tersebut adalah retribusi pasar, retribusi pasar menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang cukup berarti.

Retribusi pasar akan turut menentukan besarnya tingkat kemandirian suatu daerah dalam arti mampu mendanai sendiri segala urusan otonomi daerah. Kabupaten Magelang memiliki 21 pasar yang tersebar hampir di semua kecamatan, yang mana masing-masing pasar memberikan kontribusi berbeda-beda. Penerimaan retribusi pasar

Kabupaten Magelang berasal dari pungutan di pasar daerah dan pasar desa atas ijin pemakaian ruko, toko atau kios, bedak dan lesehan. Selain itu, penerimaan pendapatan pasar juga berasal dari tempat parkir, MCK dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

Penyetoran retribusi masing-masing pasar tentulah berbeda, hal ini disebabkan oleh tarif retribusi di setiap pasar yang tidak sama. Untuk retribusi pasar hewan ( pemakaian tempat pada kawasan pasar dan atau pasar khusus ternak ) untuk sehari atau bagiannya, ditetapkan :

1. Sapi, kerbau, kuda atau sejenisnya sebesar Rp. 2500 per ekor
2. Kambing, domba dan sejenisnya sebesar Rp. 1000 per ekor
3. Itik, ayam, bebek dan sejenisnya sebesar Rp. 250 per ekor

Bila dilihat besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh retribusi pasar, bisa dikatakan sangat mempunyai peran dalam meningkatkan PAD Kabupaten Magelang. Pendapatan dari retribusi pasar mulai tahun 1999/2000 sampai tahun 2003 selalu memberikan sumbangan terbesar pada sektor retribusi daerah.

### BAB III

#### KAJIAN PUSTAKA

Untuk mendukung penelitian ini digunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, diantaranya adalah:

- Normansyah (1999) *Kajian Potensi Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui besaran potensi retribusi pasar yang dapat digali upaya meningkatkan PAD di Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan retribusi pasar. Analisis yang digunakan adalah analisis kuantitatif, meliputi pengukuran efektivitas, efisiensi dan menghitung potensi dengan formula.

Dengan menggunakan alat analisis tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa :

- a. Potensi retribusi kota Bandar Lampung tahun anggaran 1999 / 2000 sebesar Rp. 992.136.000 baru terealisasi sebanyak 68,19%, berarti realisasinya masih relatif rendah.
- b. Selama lima tahun anggaran realisasi penerimaan retribusi pasar yang dapat direalisasikan rata – rata 100,53% / tahun dari targetnya, namun hal ini belum efektif karena masih dibawah potensinya. Biaya pemungutan retribusi pasar rata – rata 34,76% / tahun dari realisasi penerimaannya, hal ini berarti bahwa untuk merealisasikan penerimaan retribusi pasar sebesar

Rp. 100,- diperlukan biaya sebesar Rp. 34,76 yang berarti efisien.

c. Kontribusi retribusi daerah terhadap PAD rata – rata sebesar 41,02%

d. Potensi retribusi pasar di kota Bandar Lampung cukup potensial dan masih dapat ditingkatkan penerimaannya.

- Zakaruddin (1999) *Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Otonomi Daerah di Kabupaten Muna*. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi pasar, menghitung besarnya potensi retribusi pasar di Kabupaten Muna, merumuskan berbagai kebijakan strategi dalam pengelolaan dan penerimaan retribusi pasar. Penelitian ini menggunakan alat analisis berupa formula yang digunakan untuk pengukuran efektivitas ( hasil guna ), pengukuran efisiensi ( daya guna ), pengukuran potensi, penentuan *Strengtht, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT)*

Analisis SWOT adalah salah satu alat analisis manajerial dalam rangka merumuskan kebijakan strategi suatu organisasi yang memadukan interaksi antara faktor – faktor internal dan eksternal kelembagaan dari dimensi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman suatu organisasi dan untuk selanjutnya dirumuskan strategi yang relevan dalam rangka mencapai tujuan.

Penerapan analisis SWOT pada Dinas Pendapatan Kabupaten Muna adalah untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memilih strategi yang tepat dalam pengelolaan retribusi pasar pada masa yang akan datang. Penelitian tersebut menghasilkan:

1. Tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Muna adalah:
  - a. Pengukuran tingkat efektivitas berdasarkan potensi setiap tahunnya semakin kurang efektif, dimana pada tahun anggaran 1995 / 1996 tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar sebesar 61% dan selanjutnya sampai dengan tahun anggaran 1999 / 2000 menurun masing – masing menjadi sebesar 36%, 27%, 24%, dan 17%. Secara rata – rata capaian efektivitas selama periode pengamatan sebesar 33% per tahun. Menurunnya tingkat efektivitas sebagaimana dijelaskan diatas disebabkan oleh karena: ( 1 ) masih rendahnya kemampuan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Muna dalam mengelola pasar; ( 2 ) pada akhir tahun anggaran 1994 / 1995 terjadi kebakaran pasar Sentral Raha ( memiliki potensi yang cukup besar dari seluruh pasar yang ada di Kabupaten Muna ) dan pemindahan pasar ke pasar lain tidak diikuti dengan pemindahan terminal; ( 3 ) rendahnya efektivitas khususnya pada tahun anggaran 1999 / 2000 yang nilainya sebesar 17 %,

karena terjadinya kenaikan tarif retribusi yang tidak diikuti dengan sistim penagihan yang baik.

- b. Pengukuran tingkat efektivitas berdasarkan target setiap tahunnya bervariasi tetapi semakin meningkat atau semakin efektif dimana pada tahun anggaran 1995 / 1996 tingkat efektivitas penerimaan retribusi pasar sebesar 103% dan selanjutnya sampai dengan tahun anggaran 1998 / 1999 semakin menurun setiap tahunnya, yaitu masing – masing sebesar 50%, 48%, 42%, kemudian pada tahun anggaran 1999 / 2000 naik menjadi 89%. Tingginya capaian efektivitas pada tahun anggaran 1999 / 2000 karena pemanfaatan semua fasilitas pasar lain sudah maksimal dan pasar bertambah ramai sebagai akibat telah digunakannya terminal lain yang letaknya berdampingan dengan lokasi pasar. Secara rata – rata capaian efektivitas penerimaan retribusi pasar selama periode pengamatan sebesar 66% per tahun.
2. Tingkat efisiensi pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Muna selama periode pengamatan rata – rata sebesar 69% per tahun dan cenderung semakin meningkat sekalipun sangat berfluktuasi, dimana pada tahun anggaran 1995 / 1996 sampai dengan tahun anggaran 1997 / 1998 meningkat terus masing – masing dari 77% menjadi 71%, dan 52%. Kemudian pada tahun anggaran 1998 / 1999 menurun menjadi 80% dan pada

tahun anggaran 1999 / 2000 meningkat kembali menjadi 66%. Rendahnya tingkat efisiensi pengelolaan retribusi pasar sebagaimana dijelaskan diatas selain masih rendahnya efektivitas penerimaan juga disebabkan karena tingginya biaya rutin Dinas Pendapatan Kabupaten Muna khususnya komponen gaji, dimana pada tahun anggaran 1995 / 1996 komponen gaji sebesar 83% dari biaya rutin Dinas Pendapatan, dan selanjutnya pada tahun anggaran 1996 / 1997 masing – masing sebesar 83%, 81%, 76%, dan 74% dari biaya rutin, atau secara rata – rata selama periode pengamatan biaya gaji sebesar 79% per tahun dari biaya rutin Dinas Pendapatan.

3. Prospek ke depan pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Muna masih dapat ditingkatkan lagi, karena sesuai hasil perhitungan potensi dalam penelitian ini, jumlah potensi retribusi pasar di Kabupaten Muna sebesar Rp 605.840.460.-

- Syukardi (2001) *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 1999 / 2001*. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah pedagang pasar, jumlah luas lahan pasar, laju inflasi secara individu terhadap variabel penerimaan retribusi pasar dan untuk mengetahui pengaruh variabel jumlah pedagang pasar, jumlah jumlah luas lahan pasar, laju inflasi secara serempak terhadap variabel penerimaan retribusi pasar. Untuk mencapai

tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif.

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan amak dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Variabel jumlah pedagang pasar, jumlah luas lahan pasar, dan laju inflasi dianggap berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar dan yang dipilih dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda, dapat dilihat dari besarnya  $R^2$ . Nilai  $R^2$  yang diperoleh adalah 0,617781 menunjukkan bahwa sebesar 62% variasi penerimaan retribusi pasar mampu dijelaskan oleh variabel jumlah pedagang pasar, jumlah luas lahan, dan laju inflasi dan 38% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model.
2. Bahwa perubahan jumlah pedagang berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pasar sebesar 29496572 yang berarti setiap terjadi penambahan satu orang pedagang pasar maka akan menyebabkan kenaikan penerimaan retribusi pasar sebesar 29496572 rupiah.
3. Bahwa perubahan jumlah luas lahan pasar berpengaruh negatif terhadap penerimaan retribusi pasar sebesar -5278288,5 yang berarti setiap penambahan satu meter persegi dari jumlah lahan pasar maka akan menyebabkan penurunan penerimaan retribusi pasar sebesar 5278288,5 rupiah.
4. Bahwa perubahan laju inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan retribusi pasar sebesar 280408533 yang berarti setiap kenaikan 1% dari

inflasi akan menyebabkan kenaikan retribusi pasar sebesar 280408533 rupiah.

5. Berdasarkan perhitungan hasil analisis regresi dalam uji t dan uji F statistik tentang pengaruh penerimaan retribusi pasar terhadap jumlah pedagang pasar, jumlah luas lahan, dan laju inflasi adalah:
  - a. Variabel jumlah pedagang pasar mempengaruhi penerimaan retribusi pasar pada derajat kebebasan  $\alpha : 5\%$  dan t hitung sebesar 5,1862624 dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel jumlah pedagang pasar berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan retribusi pasar terbukti.
  - b. Variabel jumlah luas lahan mempengaruhi penerimaan retribusi pasar pada derajat kebebasan  $\alpha : 5\%$  dan t hitung sebesar -4,3481749 dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel jumlah luas lahan pasar berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan retribusi pasar tidak terbukti.
  - c. Variabel laju inflasi mempengaruhi penerimaan retribusi pasar pada derajat kebebasan  $\alpha : 5\%$  dan t hitung sebesar 2,6656440 dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa variabel laju inflasi berpengaruh signifikan negatif terhadap penerimaan retribusi pasar tidak terbukti.
  - d. Variabel jumlah pedagang pasar, jumlah luas lahan pasar, dan laju inflasi mempengaruhi penerimaan retribusi pasar pada derajat kebebasan  $\alpha : 5\%$  dan F hitung sebesar 9,159029 dengan demikian

hipotesis yang menyatakan bahwa variabel jumlah pedagang pasarm jumlah luas lahan, dan laju inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar terbukti.

6. Untuk hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini ditemukan penyimpangan dari uji multikolinearitas, sedangkan untuk uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi tidak ditemukan adanya penyimpangan. Dengan demikian data serta kesimpulan dari penelitian ini dapat dikatakan valid secara statistik.

## BAB IV

### LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

#### 4.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan suatu pendapatan untuk mewujudkan suatu daerah untuk menghimpun sumber – sumber dana untuk membiayai kegiatan baik rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha – usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi – potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawab.

##### 4.1.1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan yang dimaksud disini adalah sumber – sumber keuangan yang digali berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pendapatan asli daerah, maka perlu diperjelas lebih dahulu beberapa konsep dasar mengenai definisi penghasilan atau pendapatan. Pengertian atau definisi mengenai pendapatan banyak dikemukakan oleh para ahli dibidangnya. Menurut Winardi (*Kamus Ekonomi, 1991*) definisi dari pendapatan atau penghasilan seperti dipergunakan dalam ekonomi teoritika adalah hasil berupa uang atau hasil material yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa – jasa manusia bebas. Sedangkan menurut Henry Simons (*Guritno Mangkusubroto, 1994, hal. 225*) penghasilan adalah semua kekayaan atau tabungan atau dengan kata lain pendapatan adalah :

1. Nilai konsumsi dalam suatu periode tertentu yang dibiayai oleh penjualan faktor – faktor produksi, pemberian – pemberian dari orang lain, nilai kekayaan dalam periode tersebut.
2. Barang – barang yang dihasilkan dan dikonsumsi sendiri, misalnya konsumsi dari buah – buahan yang ditanam dikebun sendiri, atau penggunaan alat – alat rumah tangga yang dibuat sendiri.
3. Kenaikan netto dari kekayaan seseorang yang disebabkan oleh karena naiknya tabungan dalam suatu periode tertentu atau kenaikan nilai dari kekayaan yang dimiliki.
4. Nilai dari penggunaan barang – barang yang jangka waktu penggunaannya sama seperti halnya rumah, alat – alat rumah tangga ( meja, kursi, lemari, dan sebagainya ).

#### **4.1.2. Pengertian Daerah**

Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan daerah adalah aspirasi masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi ini timbul karena kemajuan suatu daerah tersebut dianggap sudah mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

#### **4.1.3. Sumber – Sumber Pendapatan Pemerintah**

Sumber – sumber penerimaan pemerintah pusat (*Republik Indonesia, Nota Keuangan dan RAPBN, Tahun Anggaran 1994 / 1995*) terdiri dari :

1. Penerimaan Dalam Negeri
  - a. Penerimaan minyak bumi dan gas alam.
  - b. Penerimaan perpajakan.
  - c. Penerimaan negara dan bukan negara.
2. Penerimaan Pembangunan

Cara – cara yang ditempuh pemerintah untuk mendapatkan uang pada pokoknya digolongkan (*M. Suparmoko, 1990 ; 96*) sebagai berikut :

- a. Pajak.

Yang dimaksud pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

b. Retribusi.

Retribusi adalah suatu pembayaran dari rakyat kepada pemerintah diman kita dapat melihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya bukti pembayaran retribusi tersebut. Misalnya pembayaran air minum dan pembayaran langganan listrik.

c. Keuntungan dari perusahaan – perusahaan negara.

Penerimaan dari sumber ini berasal dari pemasukan berupa laba yang berasal dari penjualan barang – barang yang dihasilkan oleh pemerintah.

d. Denda – denda dan pemasaran yang dijalankan oleh pemerintah.

e. Sumbangan masyarakat untuk jasa – jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembuatan biaya perijinan atau lisensi, tol atau pungutan sumbangan pada jalan raya tertentu.

f. Percetakan uang kertas.

Dikarenakan sifat dan fungsinya, maka pemerintah mempunyai kekuasaan yang tidak dimiliki oleh individu dalam masyarakat, oleh karena itu pemerintah juga pemerintah juga mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta kepada Bank Sentral

guna memberikan pinjaman kepada pemerintah walaupun tanpa suatu deking. Apabila percetakan uang tersebut dijalankan dengan kurang hati – hati, maka dapat mengakibatkan peredaran uang yang terlalu berlebih dipasar suatu negara sehingga efek yang akan timbul adalah terjadinya inflasi di negara yang bersangkutan.

g. Hasil dari undian negara, pemerintahan akan mendapatkan dana yaitu dari perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembar surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluaran – pengeluaran termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang dari undian negara tersebut. Undian negara ini baik sifatnya karena harga surat undian sangat murah sehingga mereka yang membelinya tidak begitu merasakan kerugian kalau tidak memperoleh keuntungan, tetapi sekedar menyumbang pemerintah. Seringkali usaha – usaha mengumpulkan dana melalui sistem undian ini membawa pengaruh yang kurang baik kepada rakyat kecil.

h. Pinjaman.

Pinjaman ini berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Pada umumnya negara – negara yang sedang

berkembang mengandalkan pembiayaan pembangunannya dari pinjaman ini.

i. Hadiah.

Sumber dana jenis ini dapat terjadi jika pemerintah pusat memberikan hadiah kepada pemerintah daerah atau swasta kepada pemerintah suatu negara atau kepada negara – negara lain.

#### **4.1.4. Sumber – Sumber pendapatan Asli Daerah**

Agar daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik – baiknya, maka perlu diberikan sumber – sumber pembiayaan yang cukup, tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber – sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah diwajibkan untuk menggali sumber – sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Menurut Undang Undang No. 32 tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ), yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah.
  - b. Hasil retribusi daerah.
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, antar lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro.

2. Dana Perimbangan.
3. Pinjaman Daerah.
4. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah.

## **4.2. Inflasi**

Inflasi merupakan masalah utama di banyak negara berkembang dan menjadi pertanda bagi negara – negara sosialis untuk melaksanakan pembangunan yang mengarah ke pasar.

### **4.2.1. Pengertian Inflasi**

Inflasi ditandai dengan adanya kenaikan tingkat harga secara umum. Tingkat harga diukur sebagai rata – rata tertimbang dari barang – barang dan jasa – jasa dalam perekonomian, dalam prakteknya kita mengukur tingkat harga keseluruhan dengan membuat indeks harga yang merupakan rata – rata harga konsumen atau produsen.  
(*Boediono, 1982 ; 155*)

### **4.2.2. Jenis Jenis Inflasi**

Seperti halnya wabah penyakit, inflasi memiliki beberapa tingkat kejadian yang berbeda (*Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1994 ; 312*), yaitu :

- a. Inflasi moderat (*moderat inflation*)

Inflasi moderat ditandai dengan harga – harga yang meningkat secara lambat.

b. *Inflasi ganas (galloping inflation)*

Inflasi dalam dua digit atau tiga digit, seperti 20, 100, atau 200 persen per tahun.

c. *Hiperinflation*

#### 4.2.3. Dampak Inflasi

Sebagai dampak adanya inflasi, maka dapat kita golongkan menjadi dua akibat utama (*Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1994 ; 314*), yaitu :

- a. Pendistribusian kembali (*redistribution*) pendapatan dan kekayaan diantara kelompok yang berbeda.
- b. Distorsi pada harga – harga relatif dan output dari barang yang berbeda, atau kadang – kadang pada output dan kesempatan kerja pada perekonomian secara keseluruhan.

#### 4.2.4. Sumber Sumber Inflasi

a. *Inflasi Inersial*

Dalam perekonomian industri modern, inflasi sangat bersifat inersial, artinya inflasi akan bertahan pada tingkat yang sama sampai kejadian – kejadian ekonomi menyebabkan untuk berubah. Sebutan lain untuk konsep ini adalah laju inflasi inti, dasar, atau laju inflasi yang diperkirakan. Laju inflasi yang diperkirakan dan yang dipergunakan dalam perjanjian – perjanjian kontrak dan perjanjian informal adalah laju inflasi inersial atau inti. Inflasi inersial dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan

diperkirakan banyak orang bahwa laju inflasi tetap sama. (*Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1994 ; 322*)

**b. Inflasi Tarikan Permintaan (*demand-pull inflation*)**

Salah satu guncangan utama terhadap inflasi adalah perubahan pada permintaan agregat. Inflasi tarikan permintaan timbul apabila permintaan agregat meningkat lebih cepat dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, menarik harga keatas untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan agregat. Akibatnya, permintaan dolar bersaing untuk penawaran komoditi yang terbatas, dan meningkatkan harganya. Pada saat pengangguran menurun dan tenaga kerja menjadi langka, upah akan meningkat dan terjadilah akselerasi proses inflasi. (*Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1994 ; 324*)

**c. Inflasi Dorongan-Biaya (*Cost-Push Inflation*)**

Selama setengah abad terakhir proses inflasi berubah, sebagaimana kilas balik pada sejarah harga – harga. Harga – harga kini bergerak satu arah meningkat pada resesi, meningkat lebih cepat pada saat booming. Hal ini terjadi pada semua perekonomian pasar di dunia. Inflasi yang diakibatkan oleh peningkatan biaya selama periode pengangguran tinggi dan penggunaan sumber daya yang kurang aktif disebut inflasi dorongan-biaya atau guncangan penawaran. (*Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1994 ; 325*)

### 4.3. Pasar

#### 4.3.1. Pengertian pasar

Pengertian pasar dalam definisi sederhana adalah bertemunya penjual dan pembeli atau bertemunya antara permintaan dan penawaran. (*Lincoln Arsyad, 1991; 23 – 24*)

Adapun definisi pasar adalah:

- a. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran atau bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- b. Pasar adalah segenap kelompok pelataran yang sebagian beratap dan sebagian terbuka tanpa atap yang ditunjuk dengan keputusan DPRD, dimana pedagang-pedagang berkumpul menjual dagangannya.
- c. Pasar adalah tempat bangunan atau lapangan tertentu yang dipergunakan untuk usaha mempertunjukkan, memperjualbelikan, menyimpan barang dagangan atau menjalankan usaha perdagangan atau memberikan atau menawarkan jasa sebagai mata pencaharian.

Kategori fungsi pasar yang didasarkan pada besarnya pasar yang ditentukan oleh tingkat keramaian, besarnya retribusi, jangkauan pelayanan besarnya fisik bangunan, kelengkapan fasilitas, keragaman komoditas, jumlah hari pasar dan sejenisnya dapat disebutkan dalam lima golongan kelas pasar, (*UU No. 3 Tahun 1992 ; 4*) yaitu:

1. Pasar kelas 1 (pasar regional)

Pasar dengan komponen bangunan yang lengkap, sistem arus barang dan orang baik di dalam maupun di luar bangunan dengan baik dan memberikan pelayanan antar kota dan atau daerah belakang/pendukung dengan luas minimal 35.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di pinggiran kota atau perkotaan sekitar jalan arteri sekunder atau kolektor primer.

2. Pasar kelas 2 (pasar kota)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dengan baik dan berfungsi memberikan pelayanan dalam kota/perkotaan dengan luas lahan minimal 13.500 m<sup>2</sup> yang berlokasi di pusat kota atau perkotaan di kawasan perdagangan/ jasa.

3. Pasar kelas 3 (pasar wilayah)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang dan orang, baik di dalam maupun di luar bangunan dan berfungsi memberikan pelayanan bagian wilayah kota/perkotaan dengan luas lahan minimal 4.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di wilayah bagian kota dalam kawasan perdagangan/jasa.

4. Pasar kelas 4 (pasar lingkungan)

Pasar dengan komponen bangunan, sistem arus barang terutama di dalam bangunan berfungsi memberikan pelayanan di

tingkat lingkungan dengan luas lahan minimal 500 m<sup>2</sup> yang berlokasi di lingkungan.

#### 5. Pasar kelas 5 (pasar warungan)

Pasar tanpa komponen bangunan, sistem arus barang berfungsi memberikan pelayanan di tingkat lokal yaitu perumahan atau desa dengan luas lahan kurang dari 500 m<sup>2</sup> dan lokasinya tersebar.

### 4.4. Retribusi

#### 4.4.1. Pengertian Retribusi

Terdapat dua karakteristik yang penting dalam retribusi (*Adolf Wagner, C. Goedhart, 1993 ; 94*), yaitu:

- a. Adanya sifat kontraprestasi tertentu yang langsung dapat ditunjuk bagi jasa yang diberikan oleh negara.
- b. Prestasi negara yang bersangkutan dilakukan berdasarkan tugas spesifik negara.

Retribusi adalah pungutan yang dikenakan pada pemakai jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Disamping itu ada beberapa pengertian tentang retribusi, yaitu :

1. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atau karena jasa yang diberikan oleh daerah. (*Bachrul Elmi, dikutip oleh Abdul Halim, 2000 ; 52*)
2. Retribusi adalah pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

*(M. Suparmoko, 2002 ; 85)*

3. Retribusi adalah penarikan sumber daya ekonomi oleh pemerintah kepada warga negara dan digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat dalam hubungannya yang bersifat publik.

*(Soetrisno. PH, 1981 ; 202)*

4. Retribusi adalah pembayaran dari rakyat kepada negara dimana bisa dilihat adanya hubungan antara balas jasa yang langsung diterima dengan adanya pembayaran retribusi tersebut.

*(M. Suparmoko, 1987 ; 94)*

5. Retribusi adalah pungutan atas pemakaian atau manfaat yang diperoleh secara langsung oleh seorang atau suatu badan karena jasa yang nyata dari pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1957 dalam pasal

2 ayat 1 menjelaskan pengertian retribusi sebagai berikut :

“Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakai atau karena masyarakat memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.”

#### 4.4.2. Obyek dan Penetapan Tarif Retribusi

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 1997, jenis retribusi disebutkan dalam pasal 18, jenis retribusi digolongkan menjadi tiga (*Muqodim, 1993 ; 116 – 117*) adalah :

a. Jasa Umum

Jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk tujuan kepentingan dan manfaat umum.

b. Jasa Usaha

Jasa yang disediakan pemerintah dengan menganut prinsip komersial.

c. Perizinan Tertentu

Perizinan yang diberikan pemerintah untuk tujuan pembinaan guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditentukan sebagai berikut:

(*Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, 2001 ; 284*)

1. Untuk retribusi jasa umum, berdasarkan kebijakan pemerintah daerah yang mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Penetapan tarif retribusi jasa umum pada dasarnya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jenis-jenis retribusi yang berhubungan dengan kepentingan nasional.

2. Untuk retribusi jasa usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.
3. Untuk retribusi perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

#### **4.5. Retribusi Pasar**

##### **4.5.1. Pengertian Retribusi Pasar**

Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasar tetap maupun tidak tetap di pasar karena retribusi pasar untuk setiap daerah pemungutan, ketentuan dan peraturannya dituangkan dalam peraturan daerah untuk tiap-tiap daerah pungutan, dapat terjadi naiknya tidak sama.

Retribusi pasar adalah uang pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasar baik tetap maupun tidak tetap di pasar.

Adolf Waqner C. Goedhart (*garis – garis besar ilmu keuangan negara, penerbit jembatan, 1973*) mengklasifikasikan pungutan retribusi pasar sebagai berikut:

1. Menurut sifat prestasi negara, retribusi pasar adalah retribusi untuk penggunaan berbagai bangunan milik pemerintah. Pedagang membayar retribusi ke pemerintah daerah sebagai konsekuensi penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan.
2. Menurut cara penentuan jumlah pungutan, retribusi pasar merupakan retribusi variable, jumlah pungutan tergantung dari kelas pasar, golongan dagangan, luas toko, petak atau gudang atau los yang digunakan serta tempat berdagang.
3. Menurut cara pembayarannya retribusi pasar termasuk retribusi kontan, pemakaian jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran tiap hari, sedangkan jasa kios melakukan pembayaran dengan sistem harian atau mingguan.

#### **4.5.2. Obyek Retribusi Pasar**

Obyek retribusi pasar terdiri dari:

1. Komponen utama, terdiri atas:
  - a. Lantai dasaran pada lahan
  - b. Lantai dasaran pada toko/kios
  - c. Lantai dasaran pada los
  - d. Lantai dasaran luar los
  - e. Lantai dasaran luar pasar
  - f. Gudang
  - g. Kandang hewan

2. Komponen penunjang, terdiri atas:
  - a. Kamar mandi/WC
  - b. Tempat parkir
  - c. Tempat bongkar muat
  - d. Kerekan barang
3. Komponen pendukung seperti tempat penitipan anak dan tempat pelayanan kesehatan.

#### **4.5.3. Penagihan Retribusi Pasar**

Penagihan retribusi pasar ini diatur dalam peraturan retribusi daerah, hal ini dimaksudkan agar para pembayar retribusi menyadari akan hak dan kewajibannya. Agar penarikan tagihan retribusi pasar dapat tercapai sesuai target maka baik pihak penagih atau pihak tertagih harus bisa melaksanakan hak serta kewajibannya dengan benar. Menurut Fitriyah Nurlaili ( *Peran Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang, 2004* ), penagihan retribusi meliputi:

- a. Yang kena retribusi disodorkan daftar isian agar pengenaan retribusi sesuai dengan jumlah yang mereka memang harus bayarkan.
- b. Yang kena retribusi harus memenuhi kewajibannya bila sesuai dengan yang mereka harus bayarkan.

Apabila hal tersebut di atas tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dapat diadakan ancaman hukuman dengan hukuman

selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya seribu rupiah. Sebelum ancaman tersebut dijalankan terlebih dahulu diadakan peendahuluan yang meliputi:

- a. Peringatan
- b. Teguran
- c. Denda atau tambahan pembayaran
- d. Penyitaan

Menurut Adolf Wagner C. Goedhart (*garis – garis besar ilmu keuangan negara, penerbit jambatan, 1973*) ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dan harus dipatuhi pada waktu memungut retribusi, yaitu:

1. Bahwa pada umumnya jasa yang dibayar dengan retribusi tersebut bermanfaat baik individu maupun masyarakat. Apabila keuntungan individu itu relatif lebih besar maka dipandang sudut pembagian beban adalah adil. Sebaliknya apabila keuntungan relatif besar bagi masyarakat maka retribusi harus ditentukan relatif lebih rendah dan sebagian besar ongkos penyediaan negara yang bersangkutan harus dibiayai oleh perpajakan.
2. pemungutan retribusi dibenarkan selama kerugian yang ditimbulkan oleh pembatasan penggunaan jasa negara itu lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkan oleh kenaikan pajak.

Apabila jasa itu lebih bermanfaat bagi masyarakat maka lebih besar juga kegunaan penurunan retribusi.

#### **4.5.4. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Pasar**

Dasar hukum dalam mengadakan pemungutan retribusi sebagai sumber keuangan daerah, berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

#### **4.5.5. Hubungan Retribusi Pasar dengan PAD**

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari sumber pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan untuk mewujudkan suatu daerah untuk menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan baik rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 97, Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, antara lain hasil penjualan asset daerah dan jasa giro

Retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah, yang mana kesemuanya terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah dan akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersangkutan.

Retribusi pasar sebagai salah satu penyumbang pendapatan daerah sangat berpotensi untuk ditingkatkan mengingat peran retribusi pasar

ini dalam peningkatan PAD. Retribusi pasar bisa terus diupayakan dan dimaksimalkan pemungutannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan. Bila pembangunan bias berjalan dengan lancar maka kesejahteraan masyarakat juga diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh retribusi pasar terhadap PAD maka upaya peningkatan retribusi pasar untuk menambah keuangan daerah harus dilanjutkan dan lebih ditingkatkan.

#### **4.6. Hipotesis Penelitian**

Sebagai jawaban sementara atas masalah yang diteliti adalah :

1. Bahwa jumlah pedagang pasar secara individual berpengaruh signifikan positif terhadap variabel penerimaan retribusi pasar.
2. Bahwa jumlah luas lahan secara individual berpengaruh signifikan positif terhadap variabel penerimaan retribusi pasar.
3. Bahwa laju inflasi secara individual berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel penerimaan retribusi pasar.
4. Bahwa variabel jumlah pedagang, luas lahan, laju inflasi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan retribusi pasar.

## **BAB V**

### **METODE PENELITIAN**

Untuk mencapai tujuan penelitian dapat digunakan dengan beberapa metode analisis yang ada, tetapi dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif.

#### **5.1. Analisis Deskriptif.**

Yaitu metode analisis dengan cara pendiskripsian faktor – faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud sebagai pendukung teori hasil dari analisis kuantitatif.

#### **5.2. Analisis Kuantitatif.**

Analisis ini ditujukan untuk menguji hipotesis melalui pengujian statistika yang bersifat relevan dengan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan dalam analisis verifikatif ini adalah :

##### **5.2.1. Analisis Regresi Berganda.**

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah pengaruh yang positif antara variabel independen (  $X_1, X_2, X_3$  ) terhadap variabel dependen (  $Y$  )

Persamaan fungsi regresi dikemukakan oleh Mustafa ( 1995, hlm. 128 ) adalah:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3$$

Dimana:

Y	=	variabel dependen
$b_0$	=	konstanta
$b_{1,2,3}$	=	koefisien yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen.
$X_1 - X_3$	=	variabel – variabel independen.

Model tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam logaritma natural. Hasil transformasi logaritma natural menghasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{Ln } Y = \text{Ln } b_0 + b_1 \text{Ln} X_1 + b_2 \text{Ln} X_2 + b_3 \text{Ln} X_3$$

Transformasi logaritma natural ini bertujuan untuk membentuk persamaan linier sehingga dapat dianalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen,

### 5.2.2. Pengujian Hipotesa dengan F-test.

Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa jauh semua variabel X atau variabel independen “berpengaruh” terhadap variabel Y atau variabel dependen secara serentak. Adapun langkah – langkah yang dilakukan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

## i. Membuat Formulasi Hipotesis

$$H_0 : b_1 = b_2 = b_3 = 0$$

Tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen ( X ) secara bersama sama terhadap variabel dependen ( Y ).

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$$

Ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen ( X ) secara bersama sama terhadap variabel dependen ( Y ).

## ii. Menggunakan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05

## iii. Mencari f hitung dengan formulasi manual:

KRR

$$Fh = \frac{\text{KRR}}{\text{KRS}}$$

KRS

Formulasi di atas dapat juga ditulis dengan :

$$Fh = \frac{\left[ \frac{b_1 \cdot \sum x_1 y + \dots + b_k \cdot \sum x_k y}{k} \right]}{\left[ \frac{\sum y^2 - (b_1 \cdot \sum x_1 y + \dots + b_k \cdot \sum x_k y)}{n - k - 1} \right]}$$

Dimana:

Fh = Hasil uji F

KRR = Kuadrat rerata regresi

KRS = Kuadrat rerata simpangan

$K$  = Banyaknya variabel  $X$

$n - k - 1$  = Derajat kebebasan simpangan

iv. Menguji hipotesis

- Jika signifikansi  $\leq 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima
- Jika signifikansi  $> 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak

Atau

- Jika  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak
- Jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima

### 5.2.3. Pengujian Hipotesa dengan T-test.

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikan tidaknya “ pengaruh “ antara masing – masing variabel independen terhadap masing – masing variabel dependen. Langkah – langkah yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

a. Membuat formulasi hipotesis

$H_0$  diterima bila  $b_1 : b_2 : b_3 = 0$  ( hipotesis nihil ), artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen (  $X$  ) terhadap variabel dependen (  $Y$  ).

$H_a$  diterima bila  $b_1 \neq b_2 \neq b_3 \neq 0$  ( hipotesis alternatif ), artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen ( X ) terhadap variabel dependen ( Y ).

- b. Menentukan taraf signifikansi sebesar 5% atau 0,05
- c. Mencari nilai t hitung dengan rumus:

$$Th = \frac{b_1}{Sb_1}$$

Dimana:

Th = nilai uji t

$b_1$  = koefisien regresi

$Sb_1$  = harga kekeliruan standar penaksir koefisien

- d. Menguji hipotesis

1. Jika signifikansi  $\leq 0,05$  ; maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Jika signifikansi  $> 0,05$  ; maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Atau

- Jika t-hitung  $<$  t-tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.
- Jika t-hitung  $\geq$  t-tabel, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

#### 5.2.4. Test Pelanggaran Asumsi Klasik.

Pengujian ini dimaksudkan untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas sifat dalam hasil estimasi. Karena apabila terjadi penyimpangan terhadap asumsi klasik tersebut uji T dan F yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak valid dan secara statistik dapat mengacaukan kesimpulan yang diperoleh.

##### 1) Uji Asumsi Autokorelasi

Autokorelasi adalah korelasi ( hubungan ) yang terjadi diantara anggota – anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu ( seperti pada runtut waktu atau time series data ) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang ( seperti pada data silang waktu atau cross sectional data ). Adapun cara mendeteksi suatu data ada atau tidaknya autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag menempatkan d statistik ke dalam daerah pengujian autokorelasi yang disusun setelah mengetahui dL serta dU.

Nilai mekanisme DW tersebut adalah:

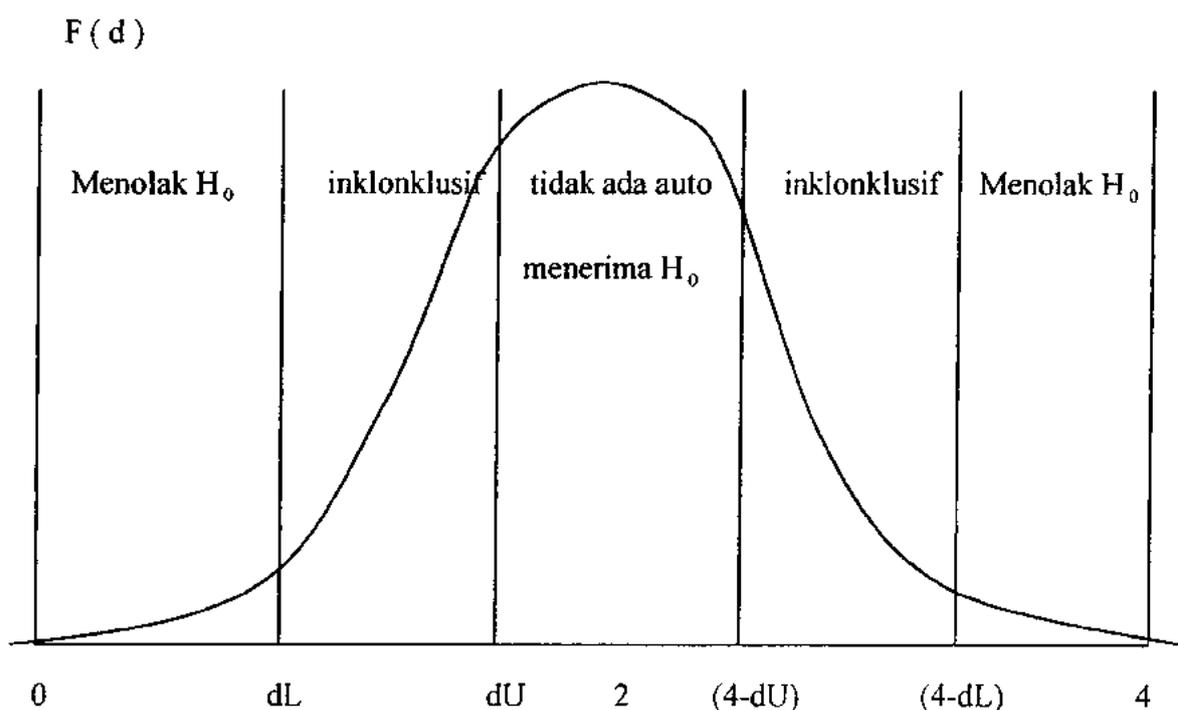
$0 - dL$  = daerah autokorelasi positif

$dL - dU$  = daerah keragu – ragan

$4dU - (4 - dU)$  = daerah tidak ada autokorelasi

$(4 - dL) - (4 - dU)$  = daerah autokorelasi negatif

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 5.1

## 2) Uji Asumsi Heterokedastisitas

Asumsi mengenai faktor – faktor gangguan adalah distribusi probabilitas gangguan tetap sama untuk seluruh pengamatan – pengamatan atas  $X$ , yaitu varian  $U_i$  adalah sama untuk seluruh nilai – nilai variabel bebas. Homogenitas varian ( atau varian konstan ) ini dikenal sebagai homoskedastisitas ( homoscedasticity ). Ada kasus dimana seluruh faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama atau variannya tidak konstan. Kondisi varian nir –

konstan atau varian nir – homogen ini disebut heterokedastisitas ( heterocedasticity ). Pengujian terhadap heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan pengujian park. Uji park dilakukan dengan membandingkan antar t tabel dengan t hitung. Perhatikan nilai t statistik, apabila signifikan berarti terdapat heterokedastisitas.

### 3) Uji Asumsi Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu asumsi dimana satu atau lebih dari variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel independen lainnya. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier diantara variabel – variabel dalam model regresi. Dengan mengikuti teori Klein yaitu dengan melakukan regresi antara variabel penjelasnya ( independen ) untuk mengetahui besarnya  $R^2$  dari masing – masing hubungan antar variabel independen tersebut lebih besar atau lebih kecil dari  $R^2$  keseluruhan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model yaitu:

- a) Nilai  $R^2$  yang dapat dihasilkan dari suatu estimasi model empiris sangat tinggi tetapi secara individual variabel – variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat.

- b) Menggunakan cara regresi parsial, caranya:
- Lakukan estimasi pada model awal  $Y = f(X_1, X_2, X_3)$  dapatkan nilai  $R^2$  - nya.
  - Lakukan auxiliary regression antar variabel penjelas.
  - Nilai  $R^2$  dari regresi – regresi ini ( poin 2 ) kemudian dibandingkan dengan  $R^2$  model utama. Jika lebih tinggi, maka di dalam model terdapat multikolinieritas.

## **BAB VI**

### **ANALISIS DATA**

#### **6.1. Analisis Kualitatif**

##### **6.1.1. Pasar Se-Kabupaten Magelang**

Di Kabupaten Magelang, terdapat 21 pasar. Pasar-pasar tersebut tersebar di kecamatan-kecamatan yang berada di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Pasar terbesar di Kabupaten Magelang adalah Pasar Borobudur dengan luas lahan 17.422,5 m<sup>2</sup> pada tahun 2003. Sedangkan pasar yang terkecil adalah adalah Pasar Tanjung Anom. Ada 3 pasar yang tidak dinyatakan luasnya, yaitu Pasar Krincing, Pasar Salam, dan Pasar Pager Gunung. Ketiga pasar ini merupakan pasar yang tidak permanen atau dengan kata lain hanya ada pada hari-hari pasaran tertentu. Pada ketiga pasar tersebut terjadi proses transaksi dalam waktu yang relatif pendek dan setelah tutup, area pasar digunakan untuk aktifitas lainnya misalnya trotoar ataupun lapangan.

Tabel 6.1 menunjukkan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Magelang dan luas pasar pada tahun 2003.

Tabel 6.1  
Pasar di Kabupaten Magelang

No	Nama Pasar	Luas Pasar (m <sup>2</sup> )
1	Pasar U. Muntilan	25.000
2	Pasar Borobudur	17.422,5
3	Pasar Salaman	12.061
4	Pasar Mekar Muntilan	27.775
5	Pasar Talun	9.976
6	Pasar Mungkid	4.316,5
7	Pasar Tempuran	5.620
8	Pasar Tanjung Anom	1.843
9	Pasar Bandongan	1.848
10	Pasar Secang	3.805
11	Pasar Krincing	0
12	Pasar U. Grabag	13.407
13	Pasar Kaliangkrik	6.618
14	Pasar Ngablak	8.132
15	Pasar Kaponan	9.111
16	Pasar Windusari	2.867
17	Pasar H. Grabag	8.250
18	Pasar H. Muntilan	17.260,38
19	Pasar H. Mertoyudan	9.976
20	Pasar Salam	-
21	Pasar Pagergunung	-
Jumlah		185.288,38

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, 2003

### 6.1.2. Jumlah Pedagang Pasar

Saat ini jumlah pedagang di seluruh pasar yang tersebar di kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Magelang adalah 8.932 pedagang. Jumlah ini dari bulan ke bulan mengalami peningkatan

selama periode penelitian. Pada awal penelitian, yaitu bulan April 2002, jumlah pedagang di pasar se-Kabupaten Magelang adalah 6.874 pedagang. Jumlah pedagang mengalami peningkatan pada bulan Agustus 2002 menjadi 7.122 pedagang. Pada bulan berikutnya, September 2002 mengalami peningkatan lagi menjadi sejumlah 7.165. Bulan Oktober 2002, jumlah pedagang kembali meningkat menjadi 7.863. Jumlah ini bertahan sampai bulan November 2002, dan mengalami peningkatan kembali pada bulan Desember 2002 menjadi 8.023. Bulan Januari 2003 jumlah pedagang menjadi 8.112, Pebruari 2003 menjadi 8.233, dan Maret 2003 menjadi 8566. Pada bulan April jumlah pedagang mengalami penambahan kembali menjadi 8.722 dan Juni 2003 jumlah pedagang menjadi 8.932. Jumlah tersebut bertahan hingga periode akhir penelitian, yaitu bulan Oktober 2003.

Secara terperinci peningkatan jumlah pedagang pasar di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2  
Jumlah Pedagang Pasar se-Kabupaten Magelang  
April 2002 – Oktober 2003

No	Bulan	Jumlah Pedagang
1	April 2002	6.874
2	Mei 2002	6.874
3	Juni 2002	6.874
4	Juli 2002	6.874
5	Agustus 2002	7.122
6	September 2002	7.165
7	Oktober 2002	7.863
8	November 2002	7.863
9	Desember 2002	8.023
10	Januari 2003	8.112
11	Pebruari 2003	8.233
12	Maret 2003	8.566
13	April 2003	8.722
14	Mei 2003	8.722
15	Juni 2003	8.932
16	Juli 2003	8.932
17	Agustus 2003	8.932
18	September 2003	8.932
19	Oktober 2003	8.932

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, 2003

### 6.1.3. Jumlah Luas Lahan

Pada bulan Oktober 2003, jumlah luas lahan pasar se-Kabupaten Magelang adalah 185.286,38 m<sup>2</sup>. Jumlah luas lahan ini terus menerus mengalami peningkatan dari luas awal pada periode penelitian, Bulan April 2002, yaitu seluas 182.746,75 m<sup>2</sup>.

Jumlah luas lahan pasar di Kabupaten Magelang secara terperinci dapat dilihat pada tabel 6.3.

Tabel 6.3  
Jumlah Luas Lahan Pasar se-Kabupaten Magelang  
April 2002 – Oktober 2003

No	Bulan	Jumlah Luas Lahan (m <sup>2</sup> )
1	April 2002	182.746,75
2	Mei 2002	182.746,75
3	Juni 2002	182.746,75
4	Juli 2002	182.746,75
5	Agustus 2002	183.349,79
6	September 2002	183.349,79
7	Oktober 2002	183.349,79
8	November 2002	183.349,79
9	Desember 2002	183.665,38
10	Januari 2003	183.665,38
11	Pebruari 2003	185.286,38
12	Maret 2003	185.286,38
13	April 2003	185.286,38
14	Mei 2003	185.286,38
15	Juni 2003	185.286,38
16	Juli 2003	185.286,38
17	Agustus 2003	185.286,38
18	September 2003	185.286,38
19	Oktober 2003	185.286,38

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, 2003

Pada bulan Agustus 2002 luas lahan pasar mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan pada bulan tersebut Pasar Salaman diperluas areanya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Bulan Desember 2002, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang kembali melakukan perluasan untuk Pasar Borobudur. Perluasan

berikutnya dilaksanakan pada bulan Pebruari 2003, untuk Pasar Talun.

#### 6.1.4. Laju Inflasi Kabupaten Magelang

Laju inflasi di Kabupaten Magelang sangat variatif, berkisar antara minus 0,65% hingga 1,76%. Tabel 6.4 berikut ini memaparkan laju inflasi di Kabupaten Magelang.

Tabel 6.4  
Laju Inflasi Kabupaten Magelang  
April 2002 – Oktober 2003

No	Bulan	Laju Inflasi (%)
1	April 2002	(0,15)
2	Mei 2002	(0,65)
3	Juni 2002	0,61
4	Juli 2002	(0,43)
5	Agustus 2002	0,4
6	September 2002	0,11
7	Oktober 2002	1,76
8	November 2002	1,34
9	Desember 2002	$7,264 \times 10^{-5}$
10	Januari 2003	0,1
11	Pebruari 2003	0,36
12	Maret 2003	(0,26)
13	April 2003	(0,11)
14	Mei 2003	0,51
15	Juni 2003	(0,4)
16	Juli 2003	0,52
17	Agustus 2003	0,9
18	September 2003	0,27
19	Oktober 2003	0,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, 2003

### 6.1.5. Penerimaan Retribusi Pasar di Kabupaten Magelang

Tabel 6.5  
Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Magelang  
April 2002 – Oktober 2003

No	Bulan	Penerimaan Retribusi Pasar (Rupiah)
1	April 2002	155.576.454,00
2	Mei 2002	192.435.490,00
3	Juni 2002	130.838.947,00
4	Juli 2002	169.116.403,00
5	Agustus 2002	151.110.026,00
6	September 2002	157.789.058,00
7	Oktober 2002	208.966.802,00
8	November 2002	252.341.438,00
9	Desember 2002	276.226.511,00
10	Januari 2003	186.645.477,00
11	Pebruari 2003	136.048.521,00
12	Maret 2003	159.802.504,00
13	April 2003	140.223.128,00
14	Mei 2003	124.354.431,00
15	Juni 2003	154.525.274,00
16	Juli 2003	153.728.617,00
17	Agustus 2003	139.935.133,00
18	September 2003	154.527.615,00
19	Oktober 2003	178.790.891,00

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, 2003

Dari tabel 6.5 dapat diketahui bahwa penerimaan retribusi tertinggi terjadi pada bulan Desember 2002, yaitu sebesar Rp. 276.226.511,00. Penerimaan retribusi terendah pada bulan Mei 2003, yaitu sebesar Rp. 124.354.431,00.

## 6.2. Analisis Kuantitatif

### 6.2.1. Analisis Regresi

Penelitian ini merupakan penelitian populasi, yaitu seluruh populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pasar yang berada di Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer menggunakan program SPSS 10. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 6.6 berikut ini:

Tabel 6.6  
Hasil Analisis Regresi Penerimaan Retribusi Pasar  
di Kabupaten Magelang

Variabel	Parameter	Koefisien Regresi	t-hitung
Konstanta	$b_0$	864,291	4,244
Ln $X_1$	$b_1$	3,811	3,688
Ln $X_2$	$b_2$	72,558	4,150
Ln $X_3$	$b_3$	-0,0325	-1,933

$R^2$  = 0,742      Std. Error = 0,1452

R = 0,862      D-W statistik = 2,094

Taraf signifikansi ( $\alpha$ ) = 5%      F statistik = 8,638

Sumber: Lampiran, 2005

Sebelum hasil regresi tersebut digunakan sebagai analisis lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan uji berdasarkan kriteria statistik dan asumsi klasik. Uji kriteria statistik meliputi uji t, uji F dan uji  $R^2$ . Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah regresi yang

dihasilkan melanggar asumsi klasik. Uji asumsi klasik meliputi uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas.

Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan dari analisis data adalah sebagai berikut:

$$\text{LnY} = 864,291 + 3,811 \text{ LnX}_1 + 72,558 \text{ LnX}_2 - 0,0325 \text{ LnX}_3$$

Nilai konstanta yang dihasilkan dari analisis regresi adalah 864,291. Artinya jika tidak ada variabel jumlah pedagang pasar ( $\text{LnX}_1$ ), jumlah luas lahan ( $\text{LnX}_2$ ) dan laju inflasi ( $\text{LnX}_3$ ), maka penerimaan retribusi pasar mempunyai nilai 864.291 rupiah.

Nilai koefisien regresi variabel jumlah pedagang pasar ( $\text{LnX}_1$ ) 3,811 dan mempunyai korelasi positif. Artinya jika variabel jumlah pedagang pasar meningkat satu satuan maka penerimaan retribusi pasar ( $\text{LnY}$ ) akan meningkat sebesar 3,811 % dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Dan jika variabel jumlah pedagang pasar menurun satu satuan maka penerimaan retribusi pasar ( $\text{LnY}$ ) akan menurun sebesar 3,811 % dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel jumlah luas lahan ( $\text{LnX}_2$ ) 72,558 dan berkorelasi positif. Artinya jika variabel jumlah luas lahan meningkat satu satu satuan maka penerimaan retribusi pasar ( $\text{LnY}$ ) akan meningkat sebesar 72,558 % dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Dan jika variabel jumlah luas lahan

menurun satu satuan maka penerimaan retribusi pasar ( $\text{LnY}$ ) akan menurun sebesar 72,558 % dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap.

Nilai koefisien regresi variabel laju inflasi ( $\text{LnX}_3$ ) 0,0325 dan mempunyai korelasi negatif. Artinya jika variabel laju inflasi meningkat satu satuan maka penerimaan retribusi pasar ( $\text{LnY}$ ) akan mengalami penurunan 0,0325 % dengan asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap. Dan jika variabel laju inflasi menurun satu satuan maka penerimaan retribusi pasar ( $\text{LnY}$ ) akan meningkat sebesar 0,0325 % asumsi bahwa variabel bebas yang lainnya tetap.

#### 6.2.2. Pengujian R dan $R^2$

Nilai R menunjukkan derajat keeratan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Dari hasil pengujian diketahui bahwa koefisien korelasi (R) antara variabel independen dan variabel dependen sebesar 0,862 yang artinya derajat keeratan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah 86,2 persen.

Uji  $R^2$  (koefisien determinasi) dilakukan untuk melihat seberapa besar variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar antara 0-1. Nilai  $R^2$  makin mendekati 0 maka pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen makin kecil Dan sebaliknya nilai  $R^2$  makin mendekati 1 maka

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen makin besar.

Dari tabel 6.6 diketahui bahwa nilai  $R^2$  adalah 0,742, yang berarti 74,2% variabel perubahan penerimaan retribusi pasar dapat dijelaskan variabel jumlah pedagang, jumlah luas lahan, dan laju inflasi. Sedangkan sisanya (25,8%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam model regresi.

### 6.2.3. Pengujian Hipotesis dengan F Test

Uji F-statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel pada derajat kebebasan ( $n-k-1$ ,  $k$ ) dan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%. Jika nilai F-hitung lebih besar dari nilai F tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas. Dan jika F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Artinya variabel bebas secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas.

Nilai F-tabel dengan derajat kebebasan (15, 3) dan  $\alpha$  5% adalah 3,287. Dari tabel 5.1 diketahui bahwa nilai F-hitung adalah 8,638. Dengan demikian F-hitung lebih besar dari nilai F-tabel, artinya secara bersama-sama variabel jumlah pedagang, jumlah luas lahan,

dan laju inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar.

#### 6.2.4. Pengujian Hipotesis dengan t Test

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung masing-masing variabel bebas dengan nilai t-tabel pada derajat kebebasan (df)  $n-2$  dan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) 5%. Dimana  $n$  adalah jumlah data. Jika nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel maka secara parsial variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Dan jika nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t-tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. Hasil Uji t dalam analisis regresi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.7  
Hasil analisis uji t dalam analisis regresi

Variabel	Koefisien regresi	Standar error	t-tabel	t-hitung	Keterangan
Konstanta	864,291	1,360	1,739	4,244	Signifikan
Ln $X_1$	3,811	0,090	1,739	3,688	Signifikan
Ln $X_2$	72,558	0,136	1,739	4,150	Signifikan
Ln $X_3$	-0,0325	0,026	1,739	1,933	Tidak Signifikan

Sumber: Lampiran, 2005

**a. Jumlah Pedagang**

Dari tabel 6.7 dapat dilihat bahwa nilai t-hitung untuk variabel jumlah pedagang pasar adalah 3,688 sedangkan nilai t-tabel ( $19 - 2; \alpha = 0,05$ ) adalah 1,739. Karena t-hitung lebih besar dari t-tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel jumlah pedagang pasar secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan retribusi. Dengan kata lain jumlah pedagang pasar berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar sebesar koefisien regresinya (3,811).

Tanda koefisien regresi jumlah pedagang adalah positif yang berarti jika variabel pedagang bertambah maka akan meningkatkan jumlah penerimaan retribusi pasar. Dan jika variabel jumlah dikurangi maka jumlah penerimaan retribusi pasar akan berkurang.

Variabel jumlah pedagang pasar mempunyai nilai koefisien regresi yang lebih rendah dibanding variabel jumlah luas lahan. Dengan demikian pengaruh jumlah pedagang pasar terhadap penerimaan retribusi pasar lebih kecil dibandingkan pengaruh jumlah luas lahan.

**b. Jumlah Luas Lahan**

Dari tabel 6.7 diketahui bahwa nilai t-hitung  $\ln X_2$  (jumlah luas lahan) adalah 4,150 sedangkan nilai t tabel adalah

1,739. Karena nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Artinya variabel jumlah luas lahan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar sebesar koefisien regresinya (72,588).

Jumlah luas lahan mempunyai nilai koefisien regresi terbesar di antara tiga variabel independen yang diuji. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah luas lahan adalah variabel yang dominan mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magelang.

#### c. Laju Inflasi

Dari tabel 5.6 diketahui bahwa nilai t-hitung untuk laju inflasi adalah  $-1,933$  sedangkan nilai t tabel adalah 1,739. Karena nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Variabel laju inflasi berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap variabel penerimaan retribusi pasar. Dengan kata lain laju inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan retribusi pasar sebesar koefisien regresinya ( $-0,0325$ ).

Tanda koefisien regresi laju inflasi adalah negatif yang berarti jika variabel laju inflasi bertambah maka akan menurunkan penerimaan retribusi pasar. Dan jika variabel laju

inflasi berkurang maka penerimaan retribusi pasar akan mengalami peningkatan.

Variabel laju inflasi memberikan sumbangan yang sangat kecil dalam menjelaskan variabel penerimaan retribusi pasar, jadi ketika laju inflasi berubah maka hanya akan berpengaruh kecil terhadap penerimaan retribusi pasar.

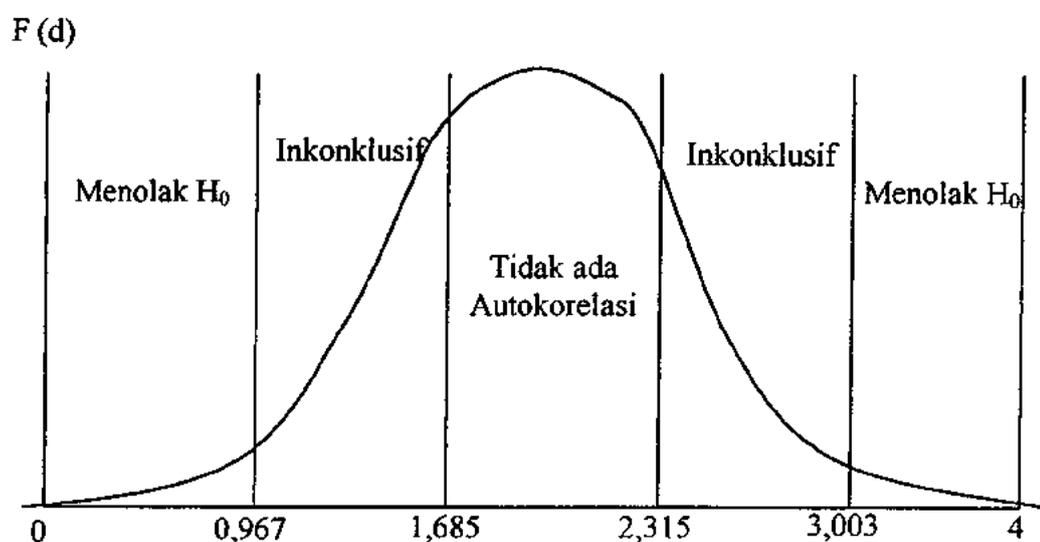
Penerimaan retribusi pasar cenderung dipengaruhi oleh jumlah luas lahan karena besarnya retribusi yang harus dibayar oleh pedagang pasar berdasarkan luas lahan yang digunakan

#### **6.2.5. Test Pelanggaran Asumsi Klasik**

##### **a. Uji Autokorelasi**

Autokorelasi merupakan gejala penyimpangan asumsi klasik dimana terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode ( $U_i$ ) dengan kesalahan pengganggu periode lainnya ( $U_{i-1}$ ). Adanya autokorelasi tersebut menyebabkan parameter OLS tidak lagi efisien. Untuk mendeteksi adanya gejala autokorelasi dilakukan uji Durbin-watson yaitu dengan membandingkan nilai Durbin-watson hitung ( $d$ ) dengan nilai Durbin-watson tabel. Durbin-watson tabel dihitung dengan melihat nilai  $d$  batas bawah ( $d_L$ ) dan nilai  $d$  batas atas ( $d_U$ ) pada tabel Durbin-watson.

Untuk  $n = 19$ ;  $\alpha = 5\%$ ;  $k = 3$ , diperoleh nilai  $d_L$  0,967 dan  $d_U$  sebesar 1,685. Berikut ini gambar kurva Durbin-Watson pada  $n = 19$ ;  $\alpha = 5\%$ ,  $k = 3$ .



Gambar 6.1  
Kurva Durbin Watson

Dari perhitungan menggunakan program SPSS diperoleh nilai Durbin-Watson (D - W) adalah 2,094. Sedangkan dari tabel D - W diperoleh nilai  $d_L$  sebesar 0,967 dan  $d_U$  sebesar 1,685 sehingga diperoleh nilai  $4 - d_L$  adalah 3,003 dan nilai  $4 - d_U$  adalah 2,315. Setelah melihat angka-angka tersebut diketahui bahwa nilai D - W lebih besar dari nilai  $d_U$  dan lebih kecil dari  $4 - d_U$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model analisis regresi.

**b. Uji Heteroskedastisitas**

Adanya heteroskedastisitas dalam model analisis mengakibatkan varian dan koefisien-koefisien OLS tidak lagi minimum dan penaksir-penaksir OLS menjadi tidak efisien meskipun penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten.

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah pengujian Park, langkah pengujiannya antara lain:

1. Melakukan regresi OLS terhadap model yang digunakan tanpa memperdulikan adanya gejala heteroskedastisitas sehingga di dapat nilai residual ( $U_i$ ).
2. Meregresikan variabel bebas ( $X$ ) dengan nilai residual sebagai variabel tidak bebas ( $Y$ ).
3. Membandingkan nilai t-hitung dari regresi yang baru dengan nilai t-tabel pada  $df = n-2$  dan tingkat keyakinan 95 (atau  $\alpha$  5%). Jika nilai koefisien regresi terhadap residual tersebut signifikan ( $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ) maka terdapat heteroskedastisitas.

Kriteria pengujiannya adalah:

$H_0$  diterima berarti terjadi homoskedastisitas atau tidak ada heteroskedastisitas

$H_a$  diterima berarti terdapat heteroskedastisitas.

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS, dan diperoleh hasil regresi seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 6.8  
Hasil regresi uji heteroskedastisitas

Variabel	t-tabel	t-hitung	Keterangan
Ln X <sub>1</sub>	1,379	0,882	Tidak ada heteroskedastisitas
Ln X <sub>2</sub>	1,379	0,080	Tidak ada heteroskedastisitas
Ln X <sub>3</sub>	1,379	0,977	Tidak ada heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran, 2005

Dari tabel 6.8 diketahui bahwa koefisien regresi semua variabel LnX tidak ada yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari nilai t-hitung masing-masing variabel LnX lebih kecil dari nilai t-tabel pada taraf signifikansi  $\alpha$  5% sehingga  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model analisis tidak terdapat heteroskedastisitas.

### c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang signifikan diantara variabel bebas. Deteksi adanya multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan metode Klein, yaitu meregresikan masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui korelasinya ( $R^{2*}$ ). Kemudian dibandingkan dengan nilai  $R^2$  yang dihasilkan dari regresi bersama antara seluruh variabel independen dengan variabel dependen. Jika ditemukan

nilai  $R^{2*}$  melebihi  $R^2$  pada model maka menunjukkan adanya multikolinearitas pada persamaan yang diuji. Sebaliknya jika  $R^{2*}$  lebih kecil dari semua  $R^2$  maka ini menunjukkan tidak ada multikolinearitas pada model persamaan yang diuji (Gujarati, 1995; 166).

Hasil pengujian multikolinearitas menggunakan uji Klein adalah sebagai berikut:

Tabel 6.9  
Hasil analisis uji multikolinearitas

Persamaan Regresi	$R^2$	Keterangan
$Y = 864,291 + 3,811 \text{ Ln}X_1 + 72,558 \text{ Ln}X_2 - 0,0325 \text{ Ln}X_3 + U_i$	0,742	
$Y = 21,342 + 0,269 \text{ Ln}X_1$	0,018	Tidak ada multikolinearitas
$Y = 185,515 + 13,576 \text{ Ln}X_2$	0,153	Tidak ada multikolinearitas
$Y = 18,870 - 0,0418 \text{ Ln}X_3$	0,249	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: Lampiran, 2005

Dari tabel hasil analisis uji multikolinearitas di atas terlihat bahwa nilai  $R^2$  hasil regresi antara variabel tidak bebas dengan masing-masing variabel bebas lebih kecil dari nilai  $R^2$  pada model. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas dalam model analisis regresi.

## BAB VII

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Secara bersama-sama variabel jumlah pedagang, jumlah luas lahan, dan laju inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magelang. Hal ini dibuktikan dengan nilai F-hitung (8,638) yang lebih besar dari nilai F-tabel (3,287).
2. Besarnya pengaruh variabel jumlah pedagang, jumlah luas lahan, dan laju inflasi terhadap variabel penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magelang cukup besar yaitu 74,2 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi. Nilai ini ditunjukkan dari besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) yaitu 0,742.

Nilai t-hitung untuk variabel jumlah pedagang pasar lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel dan bertanda positif, sehingga variabel jumlah pedagang pasar secara individual berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magelang maka hipotesis pertama terbukti. Jumlah pedagang pasar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magelang dan berkorelasi positif, sehingga bertambahnya jumlah pedagang pasar dapat meningkatkan penerimaan

retribusi pasar di kabupaten Magelang. Besarnya pengaruh jumlah pedagang terhadap penerimaan retribusi pasar adalah 3,811 dilihat dari besarnya koefisien regresi yang dihasilkan.

4. Nilai t-hitung untuk variabel jumlah luas lahan lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel dan bertanda positif, sehingga variabel jumlah luas lahan secara individual berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magelang maka hipotesis kedua terbukti. Jumlah luas lahan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar dan berkorelasi positif, sehingga bertambahnya luas lahan dapat meningkatkan penerimaan retribusi pasar di kabupaten Magelang. Besarnya pengaruh jumlah luas lahan terhadap penerimaan retribusi pasar adalah 72,558 dilihat dari besarnya koefisien regresi yang dihasilkan. Jumlah luas lahan ini berpengaruh dominan terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magelang karena mempunyai koefisien regresi tertinggi dibandingkan dengan variabel pengaruh lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi pasar yang dibayarkan oleh pedagang adalah berdasarkan luas lahan yang mereka gunakan untuk berjualan.
5. Nilai t-hitung untuk variabel laju inflasi lebih besar dibandingkan dengan nilai t-tabel dan bertanda negatif, sehingga variabel laju inflasi secara individual berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magelang maka hipotesis ketiga terbukti. Laju inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan

negatif terhadap penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magelang, sehingga meningkatnya laju inflasi akan mengurangi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Magelang. Besarnya pengaruh laju inflasi terhadap penerimaan retribusi pasar adalah 0,0325 dilihat dari koefisien regresi yang dihasilkan. Laju inflasi ini mempunyai pengaruh terkecil terhadap penerimaan retribusi pasar di kabupaten Magelang karena nilai koefisien regresinya terendah dibandingkan dengan variabel pengaruh lainnya.

6. Hasil analisis regresi yang dihasilkan bebas dari masalah asumsi klasik, yaitu autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

## 7.2. Implikasi

Implikasi hasil penelitian terhadap masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan retribusi pasar. Oleh karena itu, perlu adanya usaha untuk meningkatkan volume penerimaan tersebut mengingat semakin besarnya tuntutan perubahan di dalam menghadapi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar adalah jumlah pedagang, luas lahan, dan laju inflasi.
2. Meningkatnya jumlah pedagang dan luas lahan akan meningkatkan penerimaan retribusi pasar, sementara meningkatnya laju inflasi justru akan mengurangi penerimaan retribusi pasar. Kenyataan tersebut

memicu upaya Dinas Pengelola Pasar untuk memperluas jumlah lahan dan menambah jumlah pedagang sehingga peningkatan penerimaan retribusi pasar dapat dioptimalkan.

3. Laju inflasi yang terjadi memberikan pengaruh negatif terhadap penerimaan retribusi pasar. Laju inflasi ini berkaitan dengan kestabilan harga-harga yang beredar di pasaran. Sehingga pemerintah perlu memberi perhatian terhadap kestabilan harga untuk menekan laju inflasi.

## Daftar Pustaka

- Adolf Wagner ( Terjemahan Ratmoko, SH ), 1973, *Garis Garis Besar Ilmu Keuangan Negara*, Penerbit Jambatan.
- Boediono, 1982, *Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2*, Edisi Keempat, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Deddy Supriady Brathakusumah, Dadang Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fitriyah Nurlaili, 2004, *Peran Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang*.
- Guritno Mangkusubroto, 1994, *Ekonomi Publik*, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Halim, Abdul, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Pertama, UPP AMP YKPN.
- Lincoln Arsyad, 1998, *Ekonomi Pembangunan*, BP STIE, Yogyakarta.
- Muqodim, 1993, *Perpajakan Buku Satu*, UII Press, Ekonisia.
- M. Suparmoko, 2002, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan Dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Normansyah, *Kajian Potensi Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung*, Pasca Sarjana UGM, 1999.
- Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, 1994, *Makro Ekonomi*, Edisi Keempatbelas, Penerbit Erlangga.
- Republik Indonesia, *Nota Keuangan dan RAPBN, Tahun Anggaran 1994 / 1995*, Jakarta.
- Syukardi, *Analisis Penerimaan Retribusi Pasar Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 1999 / 2000*, FE UII, 2001.
- Soetrisno, 1981, *Dasar – Dasar Ilmu Keuangan Negara*, BPFE, Yogyakarta.

*Undang – undang otonomi daerah, 2004, diambil 16 April 2005 dari: <http://www.Djpkd.Go.Id>.*

Winardi, 1991, *Kamus Ekonomi*, CV. Mandon Maju, Bandung.

Zakaruddin, *Upaya Peningkatan Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Otoda di Kabupaten Muna*, Pasca Sarjana UGM, 2000.

# LAMPIRAN

## Tabulasi Data

Bulan	Realisasi Penerimaan Retibrusi Pasar (Rupiah)	Jumlah Pedagang Pasar (Orang)	Jumlah Luas Lahan (m2)	Laju Inflasi (%)
April '02	155.576.454	6874	182746.75	-0.15
Mei '02	192.435.490	6874	182746.75	-0.65
Juni '02	130.838.947	6874	182746.75	0.61
Juli '02	169.116.403	6874	182746.75	-0.43
Agustus '02	151.110.026	7122	183349.79	0.4
September '02	157.789.058	7165	183349.79	0.11
Oktober '02	208.966.802	7863	183349.79	1.76
November '02	252.341.438	7863	183349.79	1.34
Desember '02	276.226.511	8023	183665.38	0.00007264
Januari '03	186.645.477	8112	183665.38	0.1
Pebruari '03	136.048.521	8233	185288.38	0.36
Maret '03	159.802.504	8566	185288.38	-0.26
April '03	140.223.128	8722	185288.38	-0.11
Mei '03	124.354.431	8722	185288.38	0.51
Juni '03	154.525.274	8932	185288.38	-0.4
Juli '03	153.728.617	8932	185288.38	0.52
Agustus '03	139.935.133	8932	185288.38	0.9
September '03	154.527.615	8932	185288.38	0.27
Oktober '03	178.790.891	8932	185288.38	0.59

**Tabulasi Data setelah Dilakukan Transformasi Ln**

<b>Bulan</b>	<b>Ln Y</b>	<b>Ln X1</b>	<b>Ln X2</b>	<b>Ln X3</b>
April	18,86	8,84	12,13	.
Mei	19,08	8,84	12,13	.
Juni	18,69	8,84	12,13	-0,49
Juli	18,95	8,84	12,13	.
Agustus	18,83	8,84	12,13	-0,92
September	18,88	8,84	12,13	-2,21
Oktober	19,16	8,84	12,13	0,57
November	19,35	8,84	12,13	0,29
Desember	19,44	8,84	12,13	-9,53
Januari	19,04	9,1	12,13	-1,02
Pebruari	18,73	9,1	12,13	.
Maret	18,89	9,1	12,13	.
April	18,76	9,1	12,13	-0,67
Mei	18,64	9,1	12,13	.
Juni	18,86	9,1	12,13	-0,65
Juli	18,85	9,1	12,13	-0,11
Agustus	18,76	9,1	12,13	-1,31
September	18,86	9,1	12,13	-0,53
Oktober	19	9,1	12,13	-0,04

## Regression

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LN3, LN1, LN2		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LNY

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.862 <sup>a</sup>	.742	.656	.1452	2.094

a. Predictors: (Constant), LN3, LN1, LN2

b. Dependent Variable: LNY

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.546	3	.182	8.638	.005 <sup>a</sup>
	Residual	.190	9	2.109E-02		
	Total	.736	12			

a. Predictors: (Constant), LN3, LN1, LN2

b. Dependent Variable: LNY

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	864.291	203.632		4.244	.002
	LN1	3.811	1.033	1.435	3.688	.005
	LN2	72.558	17.482	1.633	4.150	.002
	LN3	-3.25E-02	.017	-.337	-1.933	.085

a. Dependent Variable: LNY

## Regression

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LN3, LN1, <sup>a</sup> LN2		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LNRES\_1

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.727 <sup>a</sup>	.529	.057	.7801

a. Predictors: (Constant), LN3, LN1, LN2

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.047	3	.682	1.121	.464 <sup>a</sup>
	Residual	1.826	3	.609		
	Total	3.872	6			

a. Predictors: (Constant), LN3, LN1, LN2

b. Dependent Variable: LNRES\_1

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-154.871	1215.339		-.127	.907
	LN1	5.799	6.577	.568	.882	.443
	LN2	8.282	104.046	.052	.080	.942
	LN3	9.068E-02	.093	.393	.977	.400

a. Dependent Variable: LNRES\_1

### Residuals Statistics<sup>a</sup>

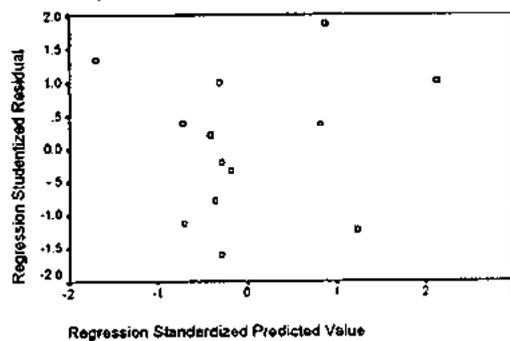
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	18.5782	19.3945	18.9398	.2134	13
Std. Predicted Value	-1.694	2.131	.000	1.000	13
Standard Error of Predicted Value	5.972E-02	.1390	7.781E-02	2.168E-02	13
Adjusted Predicted Value	18.4780	19.2463	18.8988	.1799	13
Residual	-.1862	.2229	2.689E-13	.1258	13
Std. Residual	-1.282	1.535	.000	.866	13
Stud. Residual	-1.600	1.863	.070	1.063	13
Deleted Residual	-.2898	.5057	4.101E-02	.2264	13
Stud. Deleted Residual	-1.783	2.242	.086	1.153	13
Mahal. Distance	1.106	10.076	2.769	2.399	13
Cook's Distance	.002	2.779	.319	.753	13
Centered Leverage Value	.092	.840	.231	.200	13

a. Dependent Variable: LNY

## Charts

Scatterplot

Dependent Variable: LNY



## Regression

### Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LNX1 <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LNY

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.134 <sup>a</sup>	.018	-.040	.2149

a. Predictors: (Constant), LNX1

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.443E-02	1	1.443E-02	.312	.584 <sup>a</sup>
	Residual	.785	17	4.619E-02		
	Total	.800	18			

a. Predictors: (Constant), LNX1

b. Dependent Variable: LNY

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	21.342	4.323		4.937	.000
	LNX1	.269	.481	.134	.559	.584

a. Dependent Variable: LNY

## Regression

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LN2 <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LNY

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.392 <sup>a</sup>	.153	.104	.1996

a. Predictors: (Constant), LN2

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.123	1	.123	3.079	.097 <sup>a</sup>
	Residual	.677	17	3.983E-02		
	Total	.800	18			

a. Predictors: (Constant), LN2

b. Dependent Variable: LNY

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	183.515	93.796		1.957	.067
	LN2	13.576	7.737	.392	1.755	.097

a. Dependent Variable: LNY

## Regression

### Variables Entered/Removed<sup>a</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	LNX3 <sup>a</sup>	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: LNY

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.499 <sup>a</sup>	.249	.180	.2243

a. Predictors: (Constant), LNX3

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.183	1	.183	3.638	.083 <sup>a</sup>
	Residual	.553	11	5.030E-02		
	Total	.736	12			

a. Predictors: (Constant), LNX3

b. Dependent Variable: LNY

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.670	.072		261.355	.000
	LNX3	-4.81E-02	.025	-.499	-1.907	.083

a. Dependent Variable: LNY



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## FAKULTAS EKONOMI

Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283  
Telepon (0274) 881546 - 885376 - 884019 - Fax. : 882589

### SURAT KETERANGAN

Nomor 965/PDI/I0/Bag.Um/VIII/2004

*Bismillahirrahmanirrahim*

Pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Ronal Haedari  
Tempat/tgl.lahir : Pati, 05 November 1981  
Alamat : Jl. Kaliurang Km 7,9 Yogyakarta.  
No.Mahasiswa : 00313141  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Status : Terakreditasi "A"

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tercatat terakhir pada :

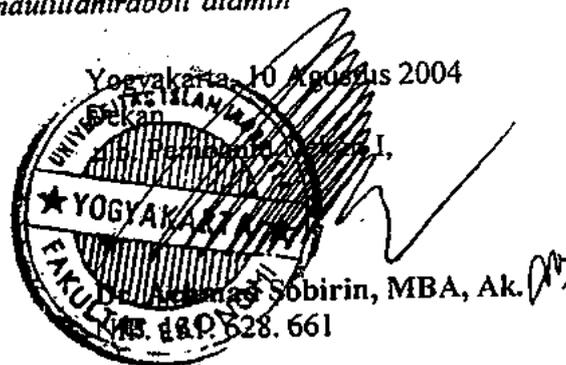
Tahun Akademik : 2004/2005  
Semester : Ganjil

Surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk keperluan pengantar lampiran syarat menjadi anggota perpustakaan *MEP UGM Yogyakarta*.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Alhamdulillahrabbi' alamin*

-54- persampul MEP UGM  
S





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)  
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda\_diy@plasa.com

Nomor : 0701 8644  
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 11 Oktober 2004  
Kepada Yth.  
Gubernur Jawa Tengah  
C.q. Ka. Bakesbanglinmas  
di SEMARANG

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Ekonomi - UII  
Nomor : 723/DEK/10/Bag.Um/X/2004  
Tanggal : 05 Oktober 2004  
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : RONAL HAEDARI  
No. Mhs. : 00313141  
Alamat Instansi : Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta  
Judul Penelitian : PERANAN POTENSI RETRIBUSI PASAR TERHADAP SUMBER  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Lokasi : Mulai 11 Oktober 2004 s/d 11 Januari 2005  
Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ub. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ekonomi - UII

3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal.





PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205  
SEMARANG

Semarang, 25 Sep 2004.

Kepada

Yth. BUPATI MAGELANG

UP. KA. KESBANG & LINMAS

DI

MUNGKID

Nomor : 070/1937/XX/2004.  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : BAPEDA DIY DI JOGYAKARTA  
Tanggal : 11 OKTOBER 2004  
Nomor : 070/8644

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : HONAL MAEDARI  
Alamat : CONDONG CATUR DEPOK SLEMAN YK  
Pekerjaan : MAHASISWA  
Kebangsaan : INDONESIA

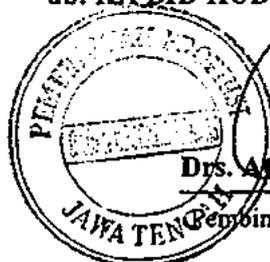
Bermaksud mengadakan penelitian judul : "PERANAN POTENSI RETRIBUSI  
PASAR TERHADAP SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB MAGELANG "

Penanggung Jawab : Drs SUWARSONO MUHAMMAD MA  
Peserta :  
Lokasi : KAB MAGELANG  
Waktu : 25 NOPEMBER s/d 25 DESEMBER 2004

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS  
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Penyina NIP : 010 217 774



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Jl. Letnan Tukiyat Telp. ( 0293 ) 788189 Kota Mungkid 56511

Kota Mungkid, 1 Desember 2004

Nomor : 072/189/Bppd/R/2004.  
Lampiran : 1 (satu) lembar.  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Research/  
Survey

Kepada Yth :

Sdr. Ka. Kantor Pengelola Pasar  
Kabupaten Magelang

Di

**KOTA MUNGKID**

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa dalam wilayah saudara akan dilaksanakan Permohonan izin memperoleh data atas nama :

**RONAL HAEDARI**

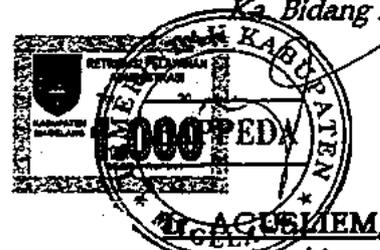
*Mahasiswa UII Yogyakarta*

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat rekomendasi Penelitian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang No: 072/189/Bppd/R/2004 Tanggal 1 Desember 2004 ( *terlampir* )

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

An. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN MAGELANG

*Ka. Bidang I*



**AGUSIEM, MM**

Pembina

NIP. 500 087 350



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

*Jl. Letnan Tukivat Telo ( 0293 ) 788189 Kota Mungkid 56511*

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 072 / 189/ Bppd / R/2004.

- I. Dasar : Surat Kepala Kantor KESBANG dan LINMAS tanggal 1 Desember 2004 , Nomor : 072/700/31/2004 perihal : Ijin Penelitian
- II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang (*BAPPEDA*), bertindak atas nama Bupati Magelang, menyatakan *TIDAK KEBERATAN* atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Kabupaten Magelang yang akan dilaksanakan oleh :
1. Nama / NIM : RONAL HAEDARI
  2. Pekerjaan : Mahasiswa
  3. Alamat : Condong Catur Depok Sleman Yk.
  4. Penanggung Jawab : Drs. SUWARSONO Muhammad MA.
  5. Tujuan : Mengadakan penelitian dengan judul :

*" Analisis Peranan Potensi Retribusi Pasar Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang "*

6. Waktu : 1 Desember 2004 s/d 30 Januari 2005
7. Lokasi : Kan. Pengelolaan Pasar Kabupaten Magelang

**III. Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :**

- a. Pelaksanaan reseach/survey/penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan reseach / survey / penelitian langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah reseach / survey / penelitian, harus menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Magelang.

Dikeluarkan di : Kota Mungkid  
pada tanggal : 1 Desember 2004

An. KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN MAGELANG  
*Ka. Bidang I*



**TEMBUSAN:**

1. Bapak Bupati Magelang  
(sebagai laporan),
2. Sdr. Ka. Kan. Pengelolaan Pasar  
Kab. Magelang
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( KESBANG DAN LINMAS )

Jl. Letnan Tukiyat No. 47 Telp. (0293) 789182 KOTA MUNGKID 56511

Kota Mungkid, 1 Desember 2004

Nomor : 072/700/31/2004  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : IJIN RESEARCH / SURVEY

Kepada Yth :  
Kepala BAPPEDA  
Kabupaten Magelang

DI

KOTA MUNGKID

1. Dasar : Surat dari Badan Kesbang dan Linmas Prop Jateng  
Nomor : 070/1937/XI/2004  
Tanggal : 23 Nopember 2004  
Tentang : Permohonan Ijin Penelitian / Research

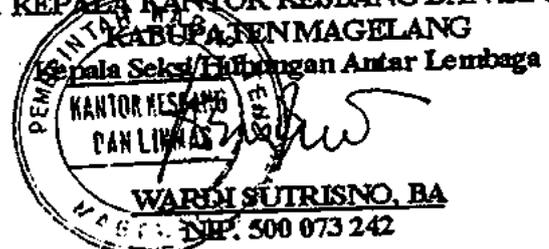
2. Dengan hormat diberitahukan bahwa kami tidak keberatan atas pelaksanaan research / survey di Kabupaten Magelang yang dilakukan oleh :

a. Nama : Ronal Haedari  
b. Pekerjaan : Mahasiswa  
c. Alamat : Condong Catur Depok Sleman Yk.  
d. Penanggung jawab : Drs Suwarsono Muhammad MA.  
e. Lokasi : Kabupaten Magelang  
f. Waktu : 1 Desember s/d 30 Januari 2005  
g. Tujuan : Mengadakan research / penelitian dengan judul :  
" Peranan Potensi Retribusi Pasar Terhadap Sumber  
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang".

3. Sebelum melakukan kegiatan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
4. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
5. Setelah pelaksanaan selesai agar menyerahkan hasilnya kepada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Magelang.
6. Surat rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang surat ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

AN. KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS



TEMBUSAN Kepada Yth :

1. Bupati Magelang ( sebagai laporan )
2. Kepala Badan / Dinas / Kantor yba.
3. Arsip.